

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi merupakan kesepakatan antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan pihak tertanggung (peserta asuransi) keduanya saling mengikat diri dengan perjanjian tertanggung membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung yang di bayarkan dalam kurun waktu tertentu di sesuaikan dengan akad (perjanjian/transaksi) diantara keduanya. Apabila premi sudah di bayar sesuai perjanjian maka pihak penanggung (perusahaan asuransi) akan memberikan ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan dalam bentuk apapun Ketika terjadi bencana ataupun kecelakaan yang terbukti terjadinya atas dasar tidak di sengaja ataupun faktor alam, maka perusahaan akan memberikan ganti rugi sesuai dengan akad (perjanjian/transaksi).

Asuransi secara umum terbagi menjadi dua jenis kategori yaitu ada asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Keduanya memiliki peran dan fungsi yang berbeda asuransi jiwa lebih menitik beratkan pada risiko yang diakibatkan oleh kematian seperti, apabila seorang kepala keluarga meninggal dunia kemudian meninggalkan seorang istri dan anak-anaknya sedangkan dia merupakan satu-satunya dalam keluarga tersebut sebagai pencari nafkah, maka seketika keluarga tersebut akan kehilangan pula pendapatannya. Oleh karena itu asuransi jiwa hadir untuk menanggulangi kemungkinan tersebut sehingga keluarga yang ditinggalkan dapat mempersiapkan diri untuk mandiri dengan uang ganti rugi yang diberikan akibat risiko kematian. Sedangkan asuransi kerugian lebih menitik beratkan pada ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan benda dan kepentingan seseorang yang melekat pada benda seperti, seseorang yang memiliki kepentingan untuk memperoleh ganti rugi atas biaya pengobatan

dan perawatan apabila seseorang yang diasuransikan mengalami kecelakaan, dan asuransi kerugian juga mencakup semua benda yang dapat di asuransikan dengan indikasi bahwa benda tersebut mempunyai nilai ekonomi.

Asuransi hadir sebagai jawaban atas ketakutan masyarakat akan ketidak pastina risiko kerugian yang akan menimpa mereka dimasa mendatang baik dalam kerugian kesehatan maupun asset yang tidak bisa mereka prediksi. Di Indonesia asuransi sudah dikenal sejak zaman Kolonial Belanda dengan didirikannya perusahaan asuransi kerugian pertama di Indonesia yang saat itu masih dikenal sebagai (Nederland Indie) perusahaan asuransi kerugian tersebut bernama *Bataviasche Zee End Brand Asurantie Maatschappij* yang beroperasi pada tahun 1853.

Pasca merdekanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), industri di sektor asuransi mulai di kendalikan oleh perekonomian negara secara mandiri yang dimulai pada tahun 1950 Setelah bangsa Indonesia merdeka. Mulai tahun 1950, asuransi mulai tumbuh lagi dimana pada periode ini bangsa Indonesia mulai membangun perekonomian sendiri. Perusahaan-perusahaan asuransi yang tadinya dibekukan mulai dibuka kembali, namun demikian adanya kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia pada saat itu yang menguasai semua jalur perekonomian, dan masa perjuangan mengembalikan wilayah Irian Barat dari tangan penjajah Bangsa Belanda, maka pada saat itu semua perusahaan asing diambil alih oleh negara, hal ini berlaku juga bagi perusahaan-perusahaan asuransi. Perusahaan-perusahaan asuransi kerugian asing yang dinasionalisasikan ini dijadikan Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) yang pada saat itu ada 6 PNAK, yaitu¹:

¹Ignatius Rusman Y. S, "Sejarah dan Perkembangan Asuransi" dalam artikel ACA Insurance (2016), h. 9-12.

1. PNAK Ika Mulya *ex. O. J. W Schlenckeer.*
2. PNAK Ika Karya *ex. Bloim Van Der Aa.*
3. PNAK Ika Chandra *ex. DE. Nederlandan Van 1945.*
4. PNAK Ika Nusa *ex NV. Assurantie Maatschappij de Nederlandshe Llyod Anno 1953.*
5. PNAK Ika Bharata *ex. Batabiashe Zee and Brand Ass 1843.*
6. PNAK Ika Bhakti *ex. Langevelt Schoroder*

Selanjutnya keenam PNAK ini dilebur menjadi tiga perusahaan negara yaitu:

1. PNAK Djasa Raharja, yang khusus bergerak dalam bidang sosial.
2. PNAK Djasa Samoedera, yang khusus bergerak untuk bidang asuransi marine.
3. PNAK Djasa Aneka, yang khusus dalam bidang asuransi kebakaran dan aneka.

Ketiga PNAK ini kemudian dilebur menjadi satu perusahaan yang disebut Perusahaan Negara Asuransi Bendasraya yang bergerak dalam semua jenis asuransi kerugian. Pada tahun 1973 Perusahaan Negara Asuransi Bendasraya ini digabungkan dengan PT Umum Internasional *Underwriter* menjadi PT (Persero) Asuransi Jasa Indonesia. PT. Jasindo merupakan hasil peleburan dari seluruh perusahaan-perusahaan asuransi asing (*Retender*) di Indonesia setelah Indonesia merdeka²

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.aca.co.id/cmsprd/uploads/C_101%2520Sejarah%2520dan%2520Perkembangan%2520Asuransi%25201504667223.pdf&ved=2ahUKEwj7vdmYgdv6AhWfznMBHREFAoUQFnoECA0QAO&usg=AOvVaw1MFf5z-QaJO7bX7TqjIxC, diakses pada: 14/10/2022, pukul 10.32 WIB.

²Ignatius Rusman Y. S, "Sejarah dan Perkembangan Asuransi" dalam artikel ACA Insurance (2016), h.9-12.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.aca.co.id/cmsprd/uploads/C_101%2520Sejarah%2520dan%2520Perkembangan%2520Asuransi%25201504667223.pdf&ved=2ahUKEwj7vdmYgdv6AhWfznMBHREFAoUQFnoECA0QAO&usg=AOvVaw1MFf5z-QaJO7bX7TqjIxC, diakses pada: 14/10/2022, pukul 10.32 WIB.

Dengan melihat hal tersebut perkembangan industri asuransi sampai saat ini sudah mengalami perkembangan yang signifikan produk yang ditawarkannyapun semakin beragam, bahkan sudah merambah ke dalam berbagai sektor, termasuk halnya dalam sektor kelautan dan perikanan yang tidak luput untuk di jadikan pangsa pasar asuransi. Sektor kelautan dan perikanan menjadi penting mengingat sebagai negara kepulauan letak geografis Indonesia yang berbentuk susunan pulau-pulau yang saling di hubungkan oleh lautan yang luas. Berdasarkan hasil Konvensi Hukum Laut Internasional atau *United Nation Convention Of The Law On The Sea* (UNCLOS) pada tanggal 19 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica, luas wilayah laut Indonesia mencapai 3.257.357 km², dengan batas wilayah laut/territorial dari garis dasar kontinen sejauh 12 mil diukur dari garis dasar³.

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan ikan-ikan sebagai bahan pangan protein, perolehan devisa dan penyediaan lapangan kerja sebagai nelayan atau petani tambak di laut, pada saat krisis ekonomi peranan sektor perikanan semakin signifikan, terutama dalam hal mendatangkan devisa melalui ekspor hasil laut, sektor kelautan dan perikanan selama ini belum mendapat perhatian secara maksimal dari pemerintah dan kalangan pengusaha, perlunya perhatian yang lebih serius pada sektor perikanan agar dapat di kelola secara maksimal terutama pada para pelaku yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut seperti nelayan. Perhatian yang lebih serius pada nelayan diharapkan dapat mendongkrak kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dapat

³ Herie Saksono, 'Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Dearah Berciri Kepulauan' dalam jurnal Bina Praja, Vol. 4, No. 1, Edisi Maret (2013), h 1-12.

mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia terutama masyarakat nelayan dan petani ikan.

Di Karangantu nelayan sebagai salah satu aktor pembangunan perekonomian maritim yang perlu ditingkatkan taraf hidupnya dan menjadikan hal tersebut sebagai salah satu tanggung jawab yang dimiliki oleh daerah dengan memberikan perlindungan terhadap jiwa dan raga nelayan serta pendapatan yang diperoleh nelayan sewaktu bekerja atau menangkap ikan di laut. Dengan demikian menjadi salah satu cara dari negara untuk memberikan perlindungan dan menambah kesejahteraan kehidupan perekonomian masyarakat nelayan.⁴

Kesejahteraan pada nelayan dapat diperoleh salah satunya dengan cara memberikan perlindungan pada mereka melalui asuransi. Asuransi dapat mengcover apabila sesuatu yang tidak diinginkan oleh para nelayan dapat terjadi sewaktu-waktu karena didalam asuransi terdapat faktor pertanggungan dan jaminan didalamnya. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan dirasakan oleh tertanggung, yang muncul dari suatu kejadian yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁵

Penangkapan ikan merupakan salah satu aktifitas para nelayan yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi untuk terjadinya

⁴ Rani Marnia. 2016. *Insurance Protection For Fisherman*. Jurnal Selat. Vol 4 No 1 Hal 1-14

⁵ Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Bab 1 Pasal 1

kecelakaan yang dapat mengakibatkan nelayan mengalami cacat maupun perawatan bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Bahaya yang berdampak bagi keselamatan nelayan diantaranya: cuaca ekstrim (ombak), terpeleset/tergelincir (lantai kapal yang licin), mekanik (tertusuk duri ikan), tergores karang, kimiawi (bahaya oli dan bahan bakar), ledakan (tekanan udara yang tinggi pada tabung kompresor), kesemuanya ini tentu akan mempengaruhi keselamatan dan kesejahteraan dari para nelayan. Oleh karena itu, para nelayan Indonesia harus mendapatkan jaminan berupa perlindungan asuransi yang dapat mengurangi beban dari nelayan jika mengalami kecelakaan.

Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan peraturan direktur jenderal perikanan tangkap No.3 tahun 2018 tentang petunjuk teknis premi asuransi nelayan menyebutkan bahwa BPAN atau Bantuan Premi Asuransi Nelayan merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang dialami nelayan pada masa yang akan datang, menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi, membangun keinginan nelayan untuk turut serta berasuransi secara mandiri, memberikan bantuan bagi ahli waris, serta memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak asuransi.⁶

Sasaran dari premi BPAN meliputi nelayan kecil dan nelayan tradisional yang telah ditentukan adalah kematian, cacat tetap dan biaya pengobatan. Indikator dari BPAN tersebut adalah tersalurkannya 100% BPAN tepat sasaran, tersalurkannya 100% klaim asuransi untuk NB-

⁶ Peraturan direktur jenderal perikanan tangkap nomor 3/per-djpt/2018, *tentang petunjuk teknis bantuan premiasuransi nelayan pada direktorat jenderal perikanan tangkap*, 2018

BPAN (Nelayan Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan) yang sesuai dengan ketentuan pencairan dan sebab kejadian.

Adapun premi yang harus dibayar dalam program BPAN (Bantuan Premi Asuransi Nelayan) ini yaitu pada tahun 2017-2018 sebesar Rp. 175.000, dan pada tahun 2019 besar premi yang harus di bayar sebesar Rp. 140.000, akan tetapi, terkadang peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tidak tepat sasaran atau bahkan ada yang keluar dari yang telah ditetapkan. Maka dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 03 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Premi Asuransi Nelayan Tahun 2018, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah terhadap keberlangsungan hidup para nelayan khususnya di daerah Karangantu Kabupaten Serang Provinsi Kota Serang-Banten.

Jumlah nelayan yang beraktifitas di PPN Karangantu pada tahun 2018 sebanyak 2.380 jiwa. Kementerian kelautan dan perikanan memberikan premi asuransi bagi nelayan. Bantuan premi asuransi bagi nelayan di Karangantu dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan dalam usaha penangkapan ikan sehingga nelayan akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya. Bantuan premi asuransi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran nelayan untuk melanjutkan asuransi secara mandiri. Nilai manfaat bantuan premi asuransi bagi nelayan terdiri dari santunan kecelakaan akibat aktifitas diluar menangkap ikan (kementerian kelautan dan perikanan, 2018).

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi juga bisa dikatakan sebagai kegiatan untuk mendistribusikan keluaran

kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan⁷.

Implementasi kebijakan yang telah diatur pemerintah Indonesia untuk melindungi nelayan dari berbagai ancaman laut ketika melaksanakan aktifitas sehari-hari dengan menggunakan asuransi yang telah disediakan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang diatur dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada nelayan. Undang-undang tersebut juga sekaligus menjadi dasar dan payung hukum bagi kementerian dalam pelaksanaan tugas terkait perlindungan kepada nelayan.⁸ Oleh karena itu penulis menetapkan judul penelitian skripsi kali ini adalah “**Analisis Implementasi Bantuan Premi Asuransi Nelayan (Studi Nelayan Di Karangantu, Kasemen, Kota Serang, Banten)**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Penjelasan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul saat melakukan observasi diantaranya, masih ada nelayan yang tidak memperoleh bahkan tidak mengetahui adanya program jaminan asuransi perlindungan nelayan atau BPAN (Bantuan Premi Asuransi Nelayan) yang di tujukan untuk mereka. Akan tetapi ada juga nelayan yang telah mengikuti program bantuan premi asuransi nelayan (BPAN) namun masih

⁷ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta,1991, Hal.21

⁸ Peraturan direktur jenderal perikanan tangkap nomor 3/per-djpt/2018, *tentang petunjuk teknis bantuan premiasuransi nelayan pada direktorat jenderal perikanan tangkap*, 2018

belum memahami secara mendalam tentang program tersebut. Artinya terdapat beberapa kendala dalam implementasi program BPAN tersebut. Oleh karena itu penulis menetapkan judul penelitian skripsi kali ini adalah **“Analisis Implementasi Bantuan Premi Asuransi Nelayan (Studi Nelayan Di Karangantu, Kasemen, Kota Serang, Banten).”**

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penulis menetapkan batasan masalah penelitian, penulis memfokuskan pada masalah analisis implementasi program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yang dilakukan di masyarakat nelayan Karangantu, Kasemen, Kota Serang, Banten.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis tetapkan diatas maka, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses implementasi program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Terhadap Nelayan di Karangantu , Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam proses implementasi program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Terhadap Nelayan di Karangantu, Kasemen, Kota Serang, Banten.?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan selalu mempunyai tujuan, begitu juga pada penelitian kali ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Terhadap Nelayan di Karangantu , Kasemen, Kota Serang, Banten.

2. Untuk mengetahui Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam proses implementasi program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Terhadap Nelayan di Karangantu, Kasemen, Kota Serang, Banten.

F. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki manfaat baik bagi penulis sendiri, bagi perusahaan atau pengambil kebijakan, maupun kepada pembaca sehingga manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis maupun teoritis bagi pihak-pihak tersebut:

1. Bagi Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Provinsi Banten, masyarakat nelayan secara luas, dan khususnya bagi masyarakat nelayan di Karangantu, Kasemen, Kota Serang, Banten. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan sebagai sarana informasi dan sumbangsi pikiran agar Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Provinsi Banten dalam proses pengimplementasian BPAN lebih maksimal depannya sehingga secara menyeluruh masyarakat nelayan dapat merasakan manfaat dari kebijakan BPAN tersebut.
2. Bagi akademisi, untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, staf pengajar dan lainnya.
3. Bagi penulis, sebagai bahan acuan pembelajaran teori maupun praktek dalam tinjauan data secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berguna bagi penulis untuk dapat memahami secara mendalam terkait dengan variabel yang diteliti.
4. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi para penulis selanjutnya yang melakukan penelitian tentang analisis implementasi Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan langkah yang diperlukan dalam melakukan penelitian dengan tujuan mencari pembandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai sumber inspirasi baru untuk penulis selanjutnya dan membantu penelitian dalam memposisikan serta menunjukkan orisinalitas. Pada penelitian kali ini penulis mengambil 5 penelitian terdahulu untuk penulis cantumkan pada penelitian kali ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Permatasari dengan judul 'Implementasi Program Bantuan Premi asuransi Nelayan (BPAN) Pada Masyarakat Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember' dalam Jurnal Pendidikan Ekonomi. Mendapat hasil dan kesimpulan bahwa Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yang telah dilaksanakan oleh Dinas perikanan Jember sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis BPAN, namun masih ada beberapa masalah di dalam pelaksanaannya. Adanya informasi yang kurang jelas, kurang menyeluruh, dan kemampuan pikir nelayan yang masih kurang mengakibatkan terhambatnya sosialisasi program. Terdapat hampir 80% nelayan masih belum terdata dalam program KUSUKA dan BPAN, selain itu ada nelayan yang telah menerima program diusulkan kembali. Tahapan pengusulan, penetapan, pengajuan dan pembayaran klaim telah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi implementasi program BPAN oleh Dinas perikanan Jember yaitu faktor penghambat yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya SDM, dan struktur

birokrasi. Sementara faktor pendukung terdiri dari disposisi dan sumberdaya fasilitas dan instrumen pelaksanaan.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Qomariyah dengan judul *Proses Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan Di Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep* dalam skripsi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember. Mendapat hasil dan kesimpulan bahwa proses implementasi program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Desa Kalianget Barat yaitu melalui tahap pengenalan dan pendataan terlebih dahulu dalam proses ini masyarakat di sarankan untuk membentuk kelompok dan membuat kartu nelayan, lalu di lanjutkan dengan sosialisasi program BPAN yang memberikan peningkatan terhadap pengetahuan masyarakat nelayan, langkah selanjutnya penyuluh langsung memproses masyarakat nelayan yang ingin mendaftar program BPAN. Penyuluh juga melakukan pendampingan agar dapat terus memberikan informasi, edukasi dan solusi bagi masyarakat yang terkendala dalam mendaftar. Proses Implementasi program BPAN dikatakan berhasil, dilihat dari jumlah nelayan yang sudah bergabung dan mendaftarkan diri dalam program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) adalah sebanyak 110 orang dari 130 orang. Sisanya sebanyak 20 orang belum mendaftar dan mengikuti program Bantuan Premi Asuransi Nelayan. Keberhasilan dalam program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di desa Kalianget Barat juga di tinjau dari

⁹ Linda Permatasari, 'Implementasi Program Bantuan Premi asuransi Nelayan (BPAN) Pada Masyarakat Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember' dalam *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol 14, No. 1 (2020) h. 1-7.

adanya proses intervensi komunitas, peran penyuluh dan partisipasi masyarakat.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yesua Billy Manapode, dengan judul Dampak Konflik Laten Terhadap Partisipasi Nelayan Sangihe Dalam Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan dalam Tesis Magister Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada. Mendapatkan hasil dan kesimpulan bahwa Implementasi program BPAN di Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, belum berjalan optimal. Nelayan Manganitu sebagai sasaran program BPAN, merasa kecewa, curiga dan hilang kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik, belum diterapkan. Implementasi program BPAN oleh pemerintah, belum menggambarkan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, keadilan, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan anti korupsi. Lebih jauh, hal ini memicu munculnya konflik laten antara sesama nelayan dengan pemerintah setempat. Konflik laten yang bersifat vertikal di Kecamatan Manganitu, dapat terlihat dari perubahan sikap, keputusan yang diambil dan hubungan emosi. Perubahan-perubahan tersebut diketahui berdasarkan pengamatan dan wawancara mendalam penyusun. Selanjutnya, konflik laten tersebut memiliki dampak terhadap tingkat partisipasi nelayan.¹¹

¹⁰ Nurul Qomariyah, 'Proses Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan Di Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep' dalam skripsi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember (2019), h. 100-114.

¹¹ Yesua Billy Manapode, 'Dampak Konflik Laten Terhadap Partisipasi Nelayan Sangihe Dalam Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan' dalam Tesis Magister Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada (2018), h. ix

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizwan Syawal, dengan judul Analisis Implementasi Program Bantuan Asuransi Nelayan Di Kota Makassar (Studi Kasus di Kampung Nelayan Unita. Memperoleh hasil penelitian yaitu terdapat terdapat 19 nelayan yang memiliki kartu asuransi yang dimulai dengan pemberian bantuan asuransi oleh pemerintah dengan nama Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2018 asuransi mandiri mulai diperkenalkan sebagai keberlanjutan dari asuransi BPAN. Asuransi mandiri ini bernama Asuransi Mandiri Terpercaya (Si MANTEP). Persepsi nelayan terhadap program bantuan asuransi menggunakan Skala Likert didapatkan hasil interval Baik dan Sangat Baik.¹²
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Khasanah Dahlan, dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan di Kabupaten Bulukumba dalam Jurnal Hukum dan Syar'iah Universitas Hasanudin. Memperoleh hasil dan kesimpulan bahwa tujuan bantuan premi asuransi nelayan diadakan maka tujuan dari BPAN tersebut belum sepenuhnya tercapai, karena nelayan dibulukumba dalam hal menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi sebagiannya belum terlaksana, hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu pertumbuhan masyarakat nelayan di kabupaten bulukumba yang mayoritas berprofesi bermata pencarian masyarakatnya adalah sebagai nelayan, dilihat dari jumlah nelayan ada di kabupaten bulukumba yaitu 13.122 orang yang terdiri dari 2.625 nelayan pengusaha dan 10.497 nelayan buruh, dan perbandingan antara mengikuti program asuransi di tiap tahunnya hanya berkisar ratusan nelayan, yaitu dimana

¹² Rizwan Syawal, 'Analisis Implementasi Program Bantuan Asuransi Nelayan Di Kota Makassar (Studi Kasus di Kampung Nelayan Unita)' dalam Skripsi Agrobisnis Perikanan Universitas Hasanuddin (2022), h. vi.

ditahun terakhir tahun 2019 dapat kita lihat yang mengikuti program asuransi nelayan hanya sebanyak 838 nelayan, maka dengan angka tersebut kita dapat melihat dari tujuan program tersebut belum mencapai 50%. Selain hal tersebut kita juga dapat melihat dari tujuan lainnya yaitu membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri juga belum tercapai karena dilihat dari pembayaran premi terkait asuransi nelayan di bulukumba yaitu masih ditanggung oleh pemerintah dan belum bersifat mandiri, sehingga tujuan dari BPAN tersebut belum terlaksana di Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan uraian tersebut jika dikaitkan dalam teori efektifitas hukum maka hal tersebut belum efektif dilihat dari definisi efektifitas yaitu, bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian melihat dari pendapat Achmad Ali bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Alipun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Dengan pendapat tersebut dapat kita lihat bahwa selain dari masyarakat itu sendiri yang menyebabkan suatu tujuan itu tidak berjalan maka penyebab lainnya tidak

terlaksananya tujuan BPAN tersebut yaitu dari penegakkan hukum atau yang menjalankan peran dalam pelaksanaan program tersebut.¹³

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran dasar pemikiran yang berisi perpaduan antara fakta, observasi, kajian Pustaka yang akan dijadikan dasar saat melakukan penelitian ilmiah. Kerangka pemikiran pada penelitian ini diantaranya seperti berikut:

- Program BPAN (Bantuan Premi Asuransi Nelayan)

Program BPAN (Bantuan Premi Asuransi Nelayan) merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dalam Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2018, program ini berisi tentang bantuan premi asuransi untuk nelayan dalam menanggulangi risiko kerugian baik ringan maupun berat seperti kehilangan nyawa mereka saat bekerja (melaut). Program ini bertujuan untuk mensejahterakan nelayan tangkap agar mereka tidak khawatir akan risiko yang mereka miliki saat bekerja (melaut).

- Proses Implementasi BPAN

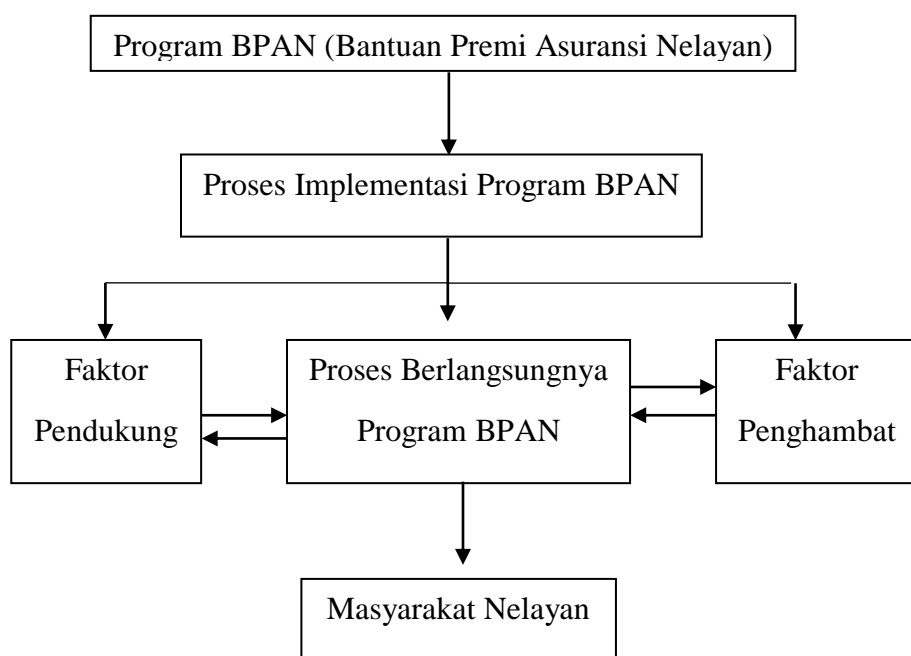
Proses implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi juga bisa dikatakan sebagai kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Dalam hal ini

¹³ Nurul Khasanah Dahlan, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan di Kabupaten Bulukumba' dalam Jurnal Hukum dan Syar'iah Universitas Hasanudin, vol. 12, No. 2, 2020, h. 241-254.

kebijakan yang dimaksud adalah BPAN (Bantuan Premi Asuransi Nelayan)

- Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan merupakan sekelompok manusia yang bertahan hidup sengan mengandalkan hasil laut dan hasil laut sebagai mata pencaharian utama mereka. Seperti melakukan penangkapan ikan di laut lepas.



I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tahapan-tahapan dalam memperoleh pengetahuan ilmiah atau ilmu. Metode penelitian dapat dikatakan juga sebagai cara sistematis untuk Menyusun sebuah karya ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada rangkaian penelitian kali ini menggunakan metode deskriptif, dengan langkah penelitian yang diambil berupa penelitian kualitatif. Metode deskriptif merupakan

sebuah metode pada penelitian yang mampu mendeskripsikan, menggambarkan dan menguraikan suatu objek yang diteliti atau diamati secara gamblang.

Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell (2008) mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam. Sesudahnya peneliti membuat permenungan pribadi (self-reflection) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut agak fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur dan bentuk laporan hasil penelitian kualitatif.¹⁴ Metode ini dipakai untuk menjelaskan bagaimana implementasi proram Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) pada desa nelayan di Karangantu, Kasemen, Kota Serang, Banten.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian kali ini penulis menetapkan 2 jenis dan sumber data, diantara sebagai berikut:

¹⁴ Prof. Dr. Conny R. Semiawan, 'Metode Penelitian Kualitatif' *Books on Google Play*, (Pages displayed by permission ofGrasindo), h.7-8, <https://books.google.co.id/books?id=dSpAlXuGUCUC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>, diakses pada: 15/20/2022, pukul. 15.08.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang sedang diteliti. Dengan demikian data primer ini penulis ambil secara langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Provinsi Banten selaku regulator dan masyarakat nelayan di Karangantu, Kasemen, Kota Serang, Banten. Sebagai sasaran dari program BPAN yang dikeluarkan oleh KKP untuk Nelayan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh melalui literatur-literatur kepustakaan seperti buku, majalah, artikel, media tulis, serta media elektronik yang berkaitan dengan tema penulisan penelitian ini. Untuk penelitian ini penulis juga akan mengambil peraturan tertulis mengenai BPAN yang dikeluarkan oleh KKP sebagai gambaran untuk penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan dengan mendatangi narasumber yakni pada Kementrian KKP Provinsi Banten dan juga Masyarakat Nelayan penerima (BPAN) di Karangantu , Kasemen, Kota Serang, Banten? , hal ini bertujuan untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi pada lokasi penelitian berkaitan dengan tema penelitian

b. *Field research*

Penulis melakukan peninjauan langsung ke lokasi Nelayan (BPAN) Terhadap Nelayan di Karangantu, Kasemen, Kota Serang, Banten untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-

data yang digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data.

c. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak KKP Provinsi Banten terkait program BPAN dan Nelayan di Karangantu, Kasemen, Kota Serang, Banten Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban.

d. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.¹⁵ dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Studi dokumentasi tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan tentang sejumlah dokumen, namun yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.

e. *Library Reasearch*

Riset Kepustakaan (*Liberary Research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca, menganalisa bukubuku serta menelusuri berbagai literatur yang berhubungan dengan pembahasan ini, serta literatur lain untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, berupa buku-buku, majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan

¹⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmuilmu Sosial*, (Jakarta, Salemba Humanika, 2010), cet. Ke-3, hal. 143.

secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dari materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam penyusunan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara menelaah data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai beberapa bentuk keunggulan kompetitif yang akan diperoleh dari wawancara dan data perkembangan dari proses implementasi program BPAN (Bantuan Premi Asuransi Nelayan) yang diperoleh kemudian menganalisa data tersebut yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat. Kemudian, ditarik sebuah kesimpulan serta saran-saran berdasarkan hasil pembahasan. Dan penulis akan menggunakan teknik analisis data metode Spradley yang dibagi kedalam beberapa tahapan seperti berikut:

a. Analisis Domain

Analisis Domain (*Domain Analysis*) Memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek/penelitian atau situasi sosial. di temukan sebagai domain atau kategori. di peroleh dengan pertanyaan grand dan minitour. Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Makin banyak domain yang di pilih, maka akan semakin banyak waktu yang di perlukan untuk penelitian.

b. Analisis Taksonomi

Analisis Taksonomi (*Taxonomic Analysis*) Domain yang di pilih selanjutnya di jabarkan lebih rinci, untuk mengetahui stuktur internalnya. Dilakukan dengan observasi terfokus.

c. Analisis komponensial

Analisis komponensial (*Componential Analysis*) Mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraksikan antar elmen. Dilakukan dengan observasi dan wawancara terseleksi.

d. Analisis Tema Kultural

Analisis Tema Kultural (*Discovering Cultural Theme*) Mencari hubungan di antara domain, dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan selanjutnya di nyatakan ke dalam tema/judul penelitian.¹⁶

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulias berfungsi sebagai gambaran mengenai isi penelitian yang sedang dilakukan ini yang pembahasannya terdiri dari V BAB akan penulis bagi dan uraikan kedalam masing-masing BAB menjadi sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini akan diberikan gambaran mengenai topik penelitian yang akan disajikan. Pendahuluan memuat beberapa hal penting yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka yang terdiri teori-teori yang mendukung penelitian. Tinjauan Pustaka pada penelitian ini memuat teori dan dasar peraturan BPAN (Bantuan Premi Asuransi Nelayan) serta teori lainnya yang akan mendukung penelitian kali ini.

¹⁶ Sugiyono, metode penelitan kuantitatif kualitatif dan R&D Bandung, Alfabeta (2017) h137-255.

BAB III merupakan kondisi objektif penelitian di Karangantu, Kasemen, Kota Serang. Menjelaskan tentang profil tempat penelitian di Karangantu, Kasemen.

BAB IV merupakan hasil penelitian, yang berisi pembahasan beserta uraian hasil penelitian yang disajikan secara objektif, jujur dan sesuai dengan etika ilmiah. Pembahasan hasil penelitian kali ini tentang Analisis Implementasi Bantuan Premi Asuransi Nelayan Terhadap Nelayan di Karangantu , Kasemen, Kota Serang, Banten.

BAB V merupakan Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban ringkas terhadap perumusan masalah yang diajukan pada bab pertama. Sedangkan, saran berisi anjuran yang ditujukan kepada pengambilan kebijakan, pengguna hasil penelitian, maupun peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian lanjutan.